

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cybercrime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2017). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana* (Edisi pertama). CV. Tazkia Rizki Utama.
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana dan transformasi kejahatan digital*. Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maskun. (2022). *Kejahatan siber (Cybercrime)*. Kencana.
- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Digest of Cyber Organized Crime* (2nd Edition, 2025).
- Widodo. (2022). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Aswaja Pressindo.
- Ninie Suparni. (2007). *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.

JURNAL:

- Asriadi. (n.d.). Analisis kecanduan judi online (Studi kasus pada siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Psikologi*.
- Ananda, A. I., & Gupran, Y. (2023). Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2), 1-10.
- DP, S. H. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 4(1).
- Fadhli, M. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. *Indagiri Law Review*, 2(2).
- Firmansyah. (2024). Kebijakan hukum pidana mengenai kejahatan judi online (Cyber gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 310–318.
- Handayani, A., Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cyber-crime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215.
- Hidayat, A., & Apriani, R. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online ditinjau dari ilmu kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 23–29.
- Husain, W. R. A.-F. (2024). Hukum pidana judi online perspektif Indonesia dan perkembangan aspek legalitas. *Journal of Human and Education*, 4.
- Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliansyah, G. (2023). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 123–129.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. 159
- Kurniawan, I. D. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian: Tantangan dan solusi dalam era digital. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 1–7.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas H, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(2), 428–539.
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak dari judi online terhadap masa depan pemuda Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102.
- Mirfandaresky, S., et al. (2022). Digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan online (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo). *Jurnal Dinamika*, 28(10).

- Prasetya, A. B. (2021). Analisis modus operandi kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 310–330.
- Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 66–81.
- Reandi, A. R. D., & Simangunsong, F. (2024). Penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku judi online di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 277–288.
- Rumbay, I. S., Tangkudung, F. X., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap lemahnya penanganan tindak pidana judi online. *Lex Privatum*, 11(5).
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80.
- SYUKUR, R. A. (2024). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Suharya, R. (2019). Fenomena perjudian di kalangan remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 326–340.
- Sulubara, S. M., dkk. (2025). Judi online sebagai cybercrime serta tantangan penegakan hukum pidana di era digital. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Terang. (2024). Kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas transaksi keuangan mencurigakan hasil tindak pidana pada perjudian online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(4).

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Baru.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PUTUSAN:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN. Jkt. Sel.

INTERNET:

GoRiau. (2025). *Eks pegawai Kominfo divonis 10 tahun penjara, terbukti cuci uang dari judi online*.

Tempo.co. (2025). *Eks pegawai Kominfo ungkap Budi Arie tahu praktik penjagaan situs judi online.*

Tempo.co. (2025). *Kasus beking judi online, 9 eks pegawai Kominfo divonis hingga 6 tahun bui.*